

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi Kebutuhan Beragama Siswa SD di Kabupaten Tapin

- a. Dimensi Substansial: Siswa yang berada pada tahap operasional konkret sangat membutuhkan narasi Ketuhanan (Tauhid), hal gaib, dan rasionalisasi mukjizat yang membumi dan dapat dicerna oleh logika sebab-akibat. Mereka juga menuntut pemaknaan Asmaul Husna yang bertransformasi dari sekadar hafalan leksikal menjadi instrumen pembentuk karakter moral.
- b. Dimensi Fungsional: Hal ini mencakup penguasaan baca tulis Al-Qur'an (BTQ) dasar, hafalan surah pendek yang aplikatif, ketepatan (presisi) gerakan ibadah fisik seperti wudu dan salat, serta pembiasaan adab dan doa yang terwujud dalam aksi nyata di lingkungan sekolah.
- c. Dimensi Kontekstual-Kultural: Hal ini mencakup rekognisi terhadap tradisi keislaman Banjar, keteladanan dari figur ulama historis lokal serta pembentukan akhlak ekologis yang merespons langsung lanskap geografis agraris dan rawa/sungai di Tapin.

2. Relevansi Kurikulum PAI dengan Kebutuhan Beragama Siswa

- a. Kesenjangan Substansial (Dogmatisme vs Nalar Konkret): Terdapat ketidakselarasan antara materi kurikulum yang disajikan secara abstrak-dogmatis dengan kapasitas imajinasi dan nalar logis siswa. Materi

tentang Ilahiyyat, Sam'iyat, hingga Qada dan Qadar sering kali diajarkan tanpa jembatan teologi rasional, sehingga gagal diinternalisasi menjadi kesadaran spiritual yang hidup.

- b. Kesenjangan Fungsional : Kurikulum terjebak pada pendekatan *paper-and-pencil test* (evaluasi kognitif), yang berakibat pada surplus teori namun defisit praktik. Tingginya hafalan teks tidak berbanding lurus dengan presisi gerakan wudu dan salat, penguasaan BTQ, maupun tanggung jawab sosial yang nyata (seperti kepedulian pada kebersihan/piket kelas).
- c. Kesenjangan Kontekstual-Kultural : Kurikulum PAI terindikasi mengalami bias standarisasi nasional dan *urban-sentris*. Penggunaan narasi tokoh fiktif, tradisi kultural luar daerah, dan ilustrasi alam perkotaan telah menciptakan *alienasi kultural* dan *ekologis*. Kurikulum gagal memfasilitasi integrasi kearifan tradisi Banjar, buta terhadap historiografi ulama lokal (Datu Sanggul), dan tidak mampu merumuskan ekopedagogi yang menjawab realitas agraris-maritim Kabupaten Tapin.

B. Saran

1. Kepada Pemangku Kebijakan (Kementerian Agama, Kemdikbudristek, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin)
 - a. Pemerintah pusat hingga daerah perlu memberikan otonomi pedagogis yang lebih luas kepada satuan pendidikan. Harus ada regulasi yang melegitimasi penilaian berbasis kearifan lokal.

- b. Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Tapin perlu memprakarsai penyusunan "Modul Suplemen PAI Berbasis Karakteristik Tapin".
2. Kepada Pendidik (Guru PAI Sekolah Dasar di Kabupaten Tapin)
 - a. Guru PAI harus berani mengambil peran sebagai pengembang kurikulum di dalam kelas, bukan sekadar pelaksana buku teks (*textbook-oriented*).
 - b. Dalam mengajarkan materi dogma, hal gaib, dan mukjizat, guru harus menjadi jembatan "Teologi Rasional". Kurangi penceritaan agama yang bersifat magis-fiktif, dan perbanyak analogi empiris yang berakar dari ekosistem keseharian siswa (sungai, kebun karet, interaksi antar-suku).
 - c. Mengingat terbatasnya jam pelajaran PAI di sekolah, guru harus proaktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pendidikan non-formal (TPQ, Langgar, dan Guru BTQ) di desa masing-masing. Guru sekolah dapat berfokus pada pemaknaan karakter, sementara penuntasan presisi psikomotorik (hafalan, tajwid, wudu) dikawal bersama-sama dengan ekosistem kultural masyarakat.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan penelitian berbasis Pengembangan (*Research and Development / R&D*).
 - b. Diperlukan penelitian lanjutan yang secara spesifik merancang, mengembangkan, dan menguji coba produk bahan ajar nyata sebagai solusi konkret untuk menambal kesenjangan kurikulum nasional yang telah dipetakan dalam penelitian ini.